

**KOORDINASI BAPPEDA DENGAN DINAS PKP
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh :

**Heni Tamara (1510511046)
Pembimbing : Drs. Itok Wicaksono, M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Telp./Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

ABSTRAK

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat secara terkoordinasi serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposif, yaitu orang/lembaga institusi yang mengetahui dan terlibat dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif yaitu tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk pemeriksaan keabsahan data yang dilaksanakan meliputi Trianggulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat Koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan Dinas PKP yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan tahap penetapan kebijakan.

Kata Kunci: Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat

ABSTRAK

Housing and settlements is one of the basic human needs in the context of increasing and equitable distribution of people's welfare. This study aims to determine government policy in the planning of community housing development in a coordinated manner and to find out what obstacles occur in the development planning of Bondowoso Regency. In this study used the type of qualitative descriptive research. Determination of research informants using purposive techniques, namely people / institutional institutions who know and are involved in planning public housing development. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data obtained were analyzed using an interactive model, namely the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. To check the validity of the data carried out includes triangulation of data. The results of this study indicate that there are four Coordination carried out by BAPEDDA with the PKP Office, namely the formulation of the problem, the policy agenda, the selection of alternative policies and the stage of policy setting.

keywords: Coordination, planning public housing development



BAB 1 PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk alami dan penambahan migrasi akibat perkembangan perekonomian daerah berdampak pada pertumbuhan kebutuhan perumahan dan perkembangan kawasan permukiman. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah serta Prasarana Sarana Umum (PSU) seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan makin tidak terkendali namun di sisi lain telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bondowoso ini perlu disusun dengan menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku (stakeholders), dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dihasilkan oleh Pemda, seperti Dokumen SPPIP/ RP2KP, RP3KP.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003:195). Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksud agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

B. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien dengan kondisi

Negara atau daerah yang bersangkutan. Menurut Arthur W. Lewis (1965), Perencanaan Pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program/kebijakan yang terencana, selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, sehingga koordinasi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi dan menyeluruh.

C. Konsep Perumahan

Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan penelitian pada perumahan lingkungan hunian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik

masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut, (Abrams, 1964 : 7). Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya, hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. (Abrams, 1964 dalam Santoso 2015).

D. Konsep Rakyat

Menurut Doed Joesoef Rakyat merupakan keseluruhan perorangan atau individu yang hidup pada wilayah nasional dan tertunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh M. Hasan. Menurut M Hasan Rakyat merupakan orang-orang satu kelompok yang berkaitan dalam membuat dan melaksanakan semua aturan bagi masyarakat tertentu. Menurut J. Waluyo rakyat berarti sebagai darah yang mana darah itu akan mengalir dan beredar sepanjang waktu didalam sebuah tubuh (bangsa), jadi apabila rakyat dan kepala Negara tidak dalam satu suara, tidak satu pemikiran, tidak satu jalan, maka dapat dipastikan bahwa kesejahteraan rakyat akan terganggu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu, dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Penelitian dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui koordinasi perencanaan

pembangunan perumahan rakyat di bondowoso dan alasan lain yang mendasari adalah ingin tau program ini sudah terlaksana dengan baik apa tidak dan juga agar peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dan informasi. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian di Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) yakni berupa pengambilan data terkait dengan perencanaan pembangunan perumahan rakyat di kabupaten bondowoso.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan metode pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah informasi atau data yang mencakup tentang Koordinasi Bappeda Dengan Dinas Pkp Tentang Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini menggunakan metode analisis data teori (Sugiono, 2012) dengan melalui tahapan :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi data (data reduction)
3. Penyajian data (data display)
4. Penarikan kesimpulan (verification)

Uji keabsahan data dalam penelitian yang sering ditekan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data.

BAB IV PEMBAHASAN

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" Lintang Selatan. Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat

Perencanaan Pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif, Perencanaan Pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam waktu jangka tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program/kebijakan yang terencana, selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, sehingga koordinasi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi dan menyeluruh. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksud agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

Terkait dengan koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan Dinas PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bondowoso menurut teori dari William N. Dunn, Formulasi Kebijakan terdiri dari 4 tahapan yakni : Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan masalah, dan Tahap penetapan kebijakan.

A. Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah yang merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam perumusan masalah dalam penelitian ini peneliti

merumuskan 2 permasalahan yaitu: bagaimana kebijakan yang dilakukan BAPPEDA terhadap perencanaan pembangunan perumahan rakyat secara terkoordinasi pada kabupaten bondowoso. Serta kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi dalam proses perencanaan pembangunan perumahan rakyat, berikut adalah Kendala-Kendala Yang Berpengaruh Dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Kabupaten bondowoso, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada pasal 1 ayat 45 Permasalahan/kendala-kendala dalam Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Puspo Pranoto, ST selaku kepala bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, beliau mengemukakan:

“Dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat dikabupaten bondowoso masih menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan pembangunan perumahan rakyat seperti masih adanya Rumah Tidak layak huni serta masih adanya backlog yang terjadi karena jumlah ketersediaan rumah yang tidak sebanding dengan banyaknya rumah tangga.” (wawancara pada 13 desember 2018).

B. Agenda Kebijakan

Suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya, apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang

besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan public. Agenda yang disusun pemerintah menyangkut beberapa masalah pokok yaitu masalah baru dari masyarakat. Masalah-masalah tersebut kemudian dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. dalam Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan kebijakan, serta pengorganisasian dengan instansi atau lembaga terkait dalam kepentingan perencanaan pembangunan. Seperti yang telah diutarakan oleh bapak Febrian Widyatmoko, ST selaku Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman menyatakan:

”Kebijakan dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso, yang mengacu pada dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi. Didalamnya terdapat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang mendukung penanganan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, melalui perencanaan sektoral mengacu pada peraturan perundangan yang ada telah disusun beberapa dokumen pendukung seperti RP3KP, RP2KPKP, RTRW yang menjadi dasar dalam kebijakan perencanaan bidang perumahan dan

kawasan permukiman.” (wawancara pada 13 desember 2018).

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh bapak Febrian Widyatmoko, ST selaku Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman dapat simpulkan bahwa dalam perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat harus melaksanakan koordinasi terlebih dahulu terkait dengan penyusunan dokumen seperti dokumen RP3KP dan dokumen lainnya yang juga menjadi dasar dalam kebijakan perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

C. Alternatif Kebijakan

Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan masalah Dalam pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dalam penelitian berupa pada dokumen-dokumen yang menjadi acuan pemerintah dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan perumahan rakyat. Adapun dokumen-dokumennya antara lain : dokumen RP2KPKP, RTRW (rencana tata ruang wilayah), RP3KP (rencana pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman), RPJMD (Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah), RENSTA (Rencana Strategis), dan RENJA (Rencana Kerja).

Berikut wawancara dengan Bapak Febrian Widyatmoko, ST selaku kepala sub bidang Infrastruktur Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bondowoso mengemukakan bahwa :

“dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat kabupaten bondowoso pihak bappeda melakukan koordinasi dengan dinas terkait (dinas PKP) dalam rangka penyusunan dokumen seperti dokumen RPJMD, RKPD, KU PPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara). Koordinasi perlu dilakukan untuk mensinkronisasi

usulan dari dinas terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang ada agar sama. Selain itu koordinasi perlu dilakukan untuk penyusunan usulan-usulan dinas terkait dalam rangka pengusulan penganggaran ke pusat dan provinsi.” (wawancara pada 13 desember 2018).

Selain itu peneliti juga akan memaparkan hasil wawancara dengan bapak Puspo Pranoto, ST yang mengemukakan :

“dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perumahan rakyat kabupaten bondowoso dilaksanakan berdasarkan RPJMD kabupaten bondowoso yang mengacu pada dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman.” (wawancara pada 13 desember 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat kabupaten bondowoso pihak bappeda melakukan koordinasi dengan dinas terkait (dinas PKP) dalam rangka penyusunan dokumen seperti dokumen RPJMD, RKPd, KU PPA (Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plapong Anggaran Sementara).

D. Tahap penetapan kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan dan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-

undang, keputusan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya. Dalam Peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 pasal 1 ayat 52 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selain itu peneliti juga akan menjabarkan pernyataan dari bapak Febryan Widyatmoko, ST yang mengemukakan :

“dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat pemerintah kabupaten bondowoso arahan kebijakan mengambil acuan dari dokumen RK3KP.RP2KPKP, serta dokumen RTRW yang kemudian dijabarkan ke dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis((RENSTRA) didalamnya terdapat tujuan, arah kebijakan, dan strategi yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja (RENJA) pemerintah kabupaten bondowoso” (wawancara pada 13 desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febryan Widyatmoko, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembangunan perumahan rakyat ada beberapa dokumen penunjang yang menjadi acuan sebagai program rencana kerja kabupaten bondowoso.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti analisa, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan

Rakyat dikabupaten bondowoso terdapat beberapa kendala-kendala yang sangat berpengaruh dalam proses Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat, seperti masih adanya rumah yang tidak layak huni, dan masih adanya Backlog rumah yang terjadi karena adanya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta minimnya bantuan dari pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah.

2. Dalam perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Kabupaten Bondowoso adanya Koordinasi sangat Diperlukan dalam Pembuatan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Kabupaten Bondowoso, Karena Tanpa adanya Koodinasi yang dilakukan oleh Bappeda dengan dinas terkait (dinas PKP) tidak akan menghasilkan Dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan dalam perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat. Seperti yang Telah peneliti uraikan Sebelumnya dalam Pembuatan dokumen RP2KPKP, RTRW dan juga Dokumen RK3KP pemerintah melakukan Koordinasi Terlebih dahulu dengan Dinas terkait (Dinas PKP).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian maka peneliti menyarankan bahwa pada saat pemerintah melakukan koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat pemerintah lebih memperhatikan kendala-kendala yang mempengaruhi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan perumahan rakyat agar dapat meminimalisir kekurangan berjalannya suatu Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat, seperti dalam perumusan masalah masih kurangnya kontribusi yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap kebijakan perencanaan pembangunan perumahan rakyat sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih adanya backlog rumah dan rumah tidak layak huni, minimnya bantuan dari pemerintah sehingga peneliti menyarankan dalam agenda kebijakan yang didalamnya terdapat penganggaran N+1 yang pengusulannya dilakukan dinas PKP berdasarkan Renstra dan Renja untuk kembali diusulkan melalui pendanaan APBD Kabupaten, APBPROVINSI, dan APBN yang diasistensikan oleh Bappeda, dalam alternatif kebijakan pemerintah perlu melakukan koordinasi untuk menskringkronisasi usulan dari dinas terkait dengan dokumen perencanaan daerah agar sama, selain itu dalam penetapan kebijakan pemerintah harus lebih memperhatikan tujuan kebijakan serta strategi pemerintah agar dalam pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perumahan Rakyat dapat mencapai tujuan pembangunan Perumahan Rakyat yang Terkoordinasi, terpadu, terarah, serta tepat sasaran seuai dengan tujuan Pembangunan Perumahan Rakyat Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

N.Dunn William, *pengantar analisis kebijakan public edisi kedua*. Gadjah Mada University Press.

Sumber Internet:

Bogdan dalam Sugiono, 2013:244, Bandung Metode Penelitian Kualitatif.

G.R Terry dala sukarna (2011:10) Pengertian Perencanaan.

Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) Teori Pembangunan,

Sumber Jurnal :

Jhon Sumiharjo Hutabarat. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan.*

Lino Pereira, Bambang Supriyono, Mochammad Makmur. 2015. *Perencanaan Pembangunan Permukiman Sebagai Upaya Peningkatan Kelayakan Hidup Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.*

Handayani Hutapea dan Ir. Djoko Suwandono. 2014. *Perencanaan Pembangunan Perumahan Baru dan Strategi Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik.*

Jordi C.F Sambo, Rita Kalalinggi, Burhanudin. 2018. *Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Untuk Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Gang Nibung Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan.*

Anita Marianata. 2014. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jurnal Provesi Fisunived.*

Dokumen Lain :

RP2KPKP kabupaten Bondowoso.

RP3KP Kabupaten Bondowoso.

RTRW kabupaten Bondowoso.

Permendagri no 86 tahun 2017

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.